

DAMAI ITU INDAH DAN PERPETUAL PEACE DI ACEH

Faradilla Fadlia ¹⁾

Ismar Ramadani ²⁾

Siti Hardiyanti ³⁾

Universitas Syiah Kuala ¹⁾
faradilla_fadlia@usk.ac.id ¹⁾

Independen Researcher, Aceh ²⁾
dhani.marisa@gmail.com ²⁾

Universitas Syiah Kuala ³⁾
sitihardiyanti@usk.ac.id ³⁾

Article Info

Article History:

Received:

August/2025

Accepted:

January/2026

Published:

June/2026

Keywords:

*Peace is Beautiful, Aceh,
Peace*

Keywords:

Damai itu indah, Aceh,
Perdamaian.

ABSTRACT

This paper discusses the construction process of the message “*Peace is Beautiful*” as a form of lasting peace and how it is conveyed by the government through the Indonesian National Armed Forces (TNI) to the people in Banda Aceh. The paper seeks to examine: What message is being communicated? What is the purpose of this message? Are there any action programs implemented in relation to this message? Furthermore, this paper aims to explore how the public and experts receive the “*Peace is Beautiful*” message. The preliminary conclusion of this paper is that there is a halted process in the construction of the message, in which the message is delivered but not followed by concrete actions. As a result, the message is received by the community with multiple interpretations. The method used is qualitative research, employing in-depth interviews and informal interviews.

ABSTRAK

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang proses konstruksi pesan Damai itu Indah sebagai bentuk perdamaian abadi dan bagaimana ini disampaikan oleh pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada masyarakat di Banda Aceh. Tulisan ini berusaha melihat apa pesan yang ingin disampaikan? apa tujuan pesan ini? apakah ada program aksi yang dilakukan terkait pesan ini? Kemudian, tulisan ini ingin melihat bagaimana masyarakat dan ahli menerima pesan Damai Itu Indah? Kesimpulan sementara tulisan ini bahwa ada proses konstruksi pesan yang terhenti dimana ada pesan yang disampaikan namun tidak diikuti dengan tindakan aksi. Oleh karena itu pesan ini diterima oleh masyarakat dan menimbulkan multitafsir. Adapun metode yang digunakan adalah

kualitatif dengan wawancara mendalam dan wawancara informal.

PENDAHULUAN

Kajian tentang perdamaian di Aceh telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dan akademisi. Diantaranya War, Peace and the Burden of History in Aceh (2010) karya Anthony Reid merupakan salah satu ulasan tentang bagaimana upaya damai yang dibangun di Aceh. Selain itu Reid juga memberikan gambaran bagaimana Aceh berada pada tiga kondisi saat tidak menjadi bagian dari Indonesia, sebagai bagian dari Indonesia, serta bagaimana Aceh dimata Indonesia. Tulisan ini juga memberikan gambaran upaya perdamaian dan kenapa hal itu gagal melalui 'invasi' militer Indonesia pada 19 Mei 2003, terutama pada masa upaya negosiasi yang digagas oleh Henry Dunant Centre melalui Perjanjian Penghentian Permusuhan (CoHA) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 9 Desember 2002. Selain itu sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespon GAM semakin memburuk dengan memberlakukan darurat militer dan 'invasi' terhadap provinsi Aceh oleh TNI pada tanggal 19 Mei 2003 dan menyebabkan Aceh tidak terjangkau oleh masyarakat Internasional dalam mendorong upaya perdamaian (He & Reid, 2004).

Studi lain yaitu, *Gender at The Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in post-2005 Aceh* (2012) oleh Katrina Lee-Koo merupakan sebuah studi yang melihat bagaimana posisi perempuan pada masa konflik, tsunami dan proses perdamaian di Aceh. Katrina menemukan tiga hal, pertama konflik dan proses perdamaian terpinggirkan oleh program internasional terkait pemulihan pasca tsunami. Kedua, Investasi wanita pada masa konflik dan perdamaian diabaikan. Ketiga, proses perdamaian mencerminkan agenda maskulin dimana ada upaya membungkam perempuan di ruang publik (Lee-koo, 2012). Selain itu dari sisi kebencanaan dan perdamaian, *Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia* (2008) oleh Jean-Christophe Gaillard, Elsa Clave dan Ilan Kelman melihat bagaimana diplomasi bencana memungkinkan upaya perdamaian sehingga mempermudah upaya mengatasi dampak bencana. Tulisan ini melihat pada kasus Aceh bencana memiliki pengaruh besar terhadap proses perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia (Gaillard et al., 2008). Studi terhadap ekonomi politik pasca perdamaian dan konflik di Aceh dilakukan oleh Edward Aspinall melalui *Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh, Indonesia* dimana Aspinall menemukan bahwa terdapat fenomena kehadiran dari mantan kombatan GAM sebagai kontraktor dan ini turut mempengaruhi sektor ekonomi Aceh pasca perdamaian dan menempatkan mantan anggota GAM sebagai orang kaya baru di Aceh (Aspinall, 2009). Perdamaian sendiri menjadi penting setelah konflik panjang yang terjadi di Aceh diwarnai dengan tindakan kekerasan (Ariefka et al., 2018), karena hanya dengan perdamaian Aceh dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini sendiri membahas perdamaian dari sisi yang sangat berbeda yaitu melihat bagaimana pesan “Damai itu Indah”, slogan “*Damai Itu Indah*” yang sering dipasang di baliho/spanduk oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai pesan perdamaian, khususnya di konteks sosial-politik di Indonesia. Pesan ini hadir di tengah masyarakat yang disampaikan melalui baliho yang terpasang di pusat-pusat kota, yaitu di Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda di tingkat provinsi dan Komando Distrik Militer (Kodim) di tingkat Kabupaten. Slogan pada baliho ini muncul pada pasca Memorandum of understanding (MOU) Helsinki bahkan sebelum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terbentuk di (Akbar, 2017).

KKR Aceh justru baru terbentuk pada akhir tahun 2016. Komisi ini akan bekerja selama 5 tahun untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh pada masa konflik Aceh pada kurun waktu periode 2016-2021. KKR merupakan komisi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh daerah di Aceh (Ocktaviana et al., 2014). Peran komisi KKR Aceh tertuang dalam Qanun nomor 17 tahun 2003 terkait dengan mengungkapkan kebenaran atas terjadinya pelanggaran HAM (Syuib & Hasnawati, 2022). Fungsi dan kewenangan KKR Aceh untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan melakukan rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa dengan merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. KKR Aceh baru bekerja setelah 13 tahun perdamaian Aceh sehingga pengungkapan kebenaran sebagai bagian dari membangun perdamaian di Aceh terlambat dilakukan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh justru baru terbentuk pada 24 Oktober 2016 (Bakri, 2016). Lembaga ini bertugas melakukan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (Rachman, 2016). Meski proses pengungkapan kebenaran ini sedang dilakukan, namun pesan Damai itu Indah yang dipopulerkan oleh TNI terlihat seperti upaya untuk melahirkan narasi bahwa damai itu sudah cukup (sudah indah).



Gambar 1. Baliho damai itu indah
Sumber: Berita Satu, 2012

Tulisan ini berusaha untuk mengeksplorasi makna/pesan/godaan “Damai itu Indah” bagi dua pihak, yaitu pihak pertama TNI sebagai pemberi pesan; pihak kedua masyarakat, media, ahli, dan aktivis sebagai penerima pesan. Pesan ini menarik karena, kita bisa menemukan pembuat pesan yang menghasilkan pesan yaitu TNI, dan pesan yang disampaikan dalam bentuk baliho tulisan, Damai itu Indah, kemudian ada audiens yang menjadi sasaran dari pesan ini yaitu masyarakat. Sehingga pesan Damai Itu Indah hadir ditengah masyarakat diletakkan di tempat-tempat strategis, tapi tidak terlihat kepentingan kenapa pesan itu hadir termasuk tidak ada proses internalisasi pesan tersebut menjadi nilai dan kegiatan atau program untuk mendukung slogan tersebut. Sehingga pesan ini terlihat hanya berdiri sendiri tanpa aksi.

Pesan Damai Itu Indah yang hadir tanpa adanya aksi menyebabkan interpretasi yang beberapa bagi masyarakat. Pertama, melalui wawancara yang dilakukan penulis, Shadia warga Banda Aceh mengatakan baginya baliho tersebut sebagai pesan biasa saja tanpa makna, sama seperti tulisan TNI lain, “Bersama Rakyat TNI Kuat”. Berikut pernyataan, Shadia. “saya sering melihat tulisan itu di Blang Padang saat lari pagi, ukuran balihonya cukup besar dan menurut saya saat melihat tulisan itu, slogan biasa tanpa makna, dan menurut saya pesan itu sangat arogan, khas TNI” (Warga Banda Aceh 2018). Pernyataan berbeda disampaikan oleh, Faisal Hadi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh dan aktivis HAM di Aceh yang mengatakan bahwa Damai itu Indah hanya pesan damai, sama seperti “NKRI Harga Mati”, “Itu hanya jargon biasa tapi tidak punya nilai, karena tidak ada program yang mengikuti slogan tersebut”. Walaupun secara tugas TNI adalah pihak yang melakukan aksi bela Negara di bawah naungan NKRI (Lubis, 2021). Sedangkan slogan NKRI harga mati merupakan suatu upaya memperkuat hubungan antar bangsa Indonesia (Zulfikar et al., 2023).

Dari uraian diatas tulisan ini berusaha untuk menjawab dua hal; Pertama, pesan apa yang ingin disampaikan oleh TNI dan apa kepentingan dari pesan tersebut. Kedua, apa pesan yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima pesan Damai Itu Indah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada metode tersebut peneliti mengkaji fenomena yang terjadi serta menguji dengan menggunakan teori (Abdul Fatah, 2023). Data yang diperoleh melalui metode ini adalah dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data melalui dokumentasi (Feny Rita Fiantika et al., 2022). Metode kualitatif digunakan untuk dapat menganalisa permasalahan sosial menggunakan hasil wawancara mendalam dengan beberapa orang yang terlibat dalam upaya perdamaian di Aceh termasuk aktivis, peneliti, Humas TNI, akademisi, praktisi, masyarakat dan pihak media. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara informal interview, dan wawancara secara mendalam.

TEORI

Perpetual Peace merupakan gagasan perdamaian yang dicetuskan oleh Immanuel Kant. Sebagai salah satu sarjana liberalisme klasik yang mengkritik praktik hubungan internasional yang sarat dengan kekerasan dan perilaku barbar. Dalam esai dengan judul *Toward Perpetual Peace: a Philosophical Sketch* pada tahun 1795, hampir bersamaan dengan perjanjian damai *The Treaty of Bassel* antara Prusia dan Prancis pada Maret 1795. Bagi Kant, perjanjian damai ini hanya penghentian sementara, bukan perdamaian. Kant juga menjelaskan bahwa kondisi dunia dapat diubah menjadi perdamaian, bahkan perdamaian abadi dapat dicapai karena kesadaran setiap individu tentang perdamaian, konstitusi pada pemerintahan demokratis, serta perjanjian antar negara untuk mengakhiri perang, dan kosmopolitanisme atau universalisme komunitas (Kant, 1989). Kant juga mengungkapkan bahwa hanya liberalisme yang dapat menciptakan perdamaian antar negara karena negara liberal cenderung mau bekerjasama dengan negara lain. Tesis Kant terus berkembang dan diterima dan memotivasi banyak “Kantian” dalam ilmu hubungan internasional.

Gagasan Perpetual Peace sendiri diaplikasikan melalui konsep Segitiga Damai Kantian. Dimana Kant menjelaskan bahwa perdamaian akan tercapai jika suatu negara mengadakan perjanjian dengan negara lain mengenai ideologi politik, ekonomi, dan partisipasi dalam lembaga atau organisasi internasional. Kant menganggap perdamaian akan tercapai jika salah satu pihak telah mendapatkan apa yang diinginkannya dari pihak lain dan menjadikannya sebagai syarat atau alternatif perdamaian (Gilady, 2017). Setelah dicermati konsep segitiga Kantian, masih terdapat kejanggalan mengenai hakikat makna perdamaian. Segitiga Kantian justru akan mengarah pada perdamaian bersyarat, bukan perdamaian berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

Merujuk pada penjelasan di atas perdamaian di Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005, merupakan bentuk perdamaian yang bersyarat yaitu UU No. 11/2006 (Sulaiman, 2012). Dimana pihak GAM mengajukan sejumlah persyaratan pada saat negosiasi yaitu keistimewaan Aceh dalam menerapkan sejumlah aturan dalam pemerintahan yang terangkum dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dimana UUPA ini merupakan kompensasi langsung dari perjanjian damai yang dilakukan (Sulaiman, 2012). Undang undang ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Aceh dengan kewenangan khusus tercantum pada UU No. 11/2006 adalah sebagai berikut: (1) Kewenangan dalam pembentukan UU, pembuatan persetujuan internasional dan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Aceh; (2) Kewenangan dalam hal kerjasama internasional; (3) Kewenangan dalam pembentukan badan/lembaga/komisi. (lebih lanjut lihat Sulaiman, 2012. 153-155). Tiga poin ini telah memberi banyak perubahan di Aceh terutama dalam kelembagaan, sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Sementara itu untuk isu-isu kemanusiaan dan keadilan justru tidak dikedepankan terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban konflik yang mengalami kekerasan. Dimana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR

Aceh) justru baru dibentuk dan diresmikan 11 tahun setelah perdamaian Aceh tepatnya pada 24 Oktober 2016. . KKR Aceh dibentuk berdasarkan Qanun No. 13 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (Qanun KKR Aceh) yang merupakan mandat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mulai bekerja sejak dilantik pada tanggal 24 Oktober 2016. Pembentukan Komisi juga merupakan mandat dan bagian penting dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau dikenal dengan Perjanjian Helsinki 2005.

Lembaga KKR Aceh bekerja dalam Rekonsiliasi dan Pengungkapan Kebenaran melalui serangkaian kegiatan seperti; Dengar Kesaksian, Pengambilan pernyataan, Transmisi data, Analisis data, Menyusun laporan, Penyerahan laporan kepada Pemerintah Aceh, Melakukan reparasi. Dalam kerja kerja ini Lembaga KKR mendapatkan banyak dukungan dari Asian For Justice (AJAR), KontraS Aceh, LBH, Koalisi NGO HAM, Pidie Mengajar, Katahati, Komnas Perempuan, dan LPSK. Kolaborasi lembaga yang telah bekerja 8 tahun ini sudah mengeluarkan laporan bertajuk, *Peurala Damee* (2023) yang berarti merawat/menjaga perdamaian. Laporan ini berisi dokumentasi 4.675 pernyataan saksi dan korban dari total 5.195 pernyataan yang terkumpul yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti. Selain itu KKR Aceh juga sudah melakukan rekonsiliasi pertama di Desa Sedie Jadi, Bener Meriah pada 22 Maret 2022 antara Fauzan Azima sebagai perwakilan GAM (pelaku) dan Sutriesno sebagai perwakilan korban.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan terkait pemahaman elemen masyarakat Banda Aceh terhadap pesan “Damai Itu Indah” dimana ada tiga kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang pesan “Damai Itu Indah”. Pertama, kelompok masyarakat pertama dari aktivis, akademisi, jurnalis melihat “Damai Itu Indah” sebagai Slogan atau jargon, khas TNI. Kedua, kelompok masyarakat atau keluarga yang menjadi korban konflik melihat pesan “Damai Itu Indah” tidak sesuai karena bagi mereka korban dan keluarga korban Damai itu tidak indah karena tidak mendapatkan keadilan. Ketiga, kelompok masyarakat usia muda yang balita atau lahir pada masa tsunami dan sesudah tsunami, mereka setuju bahwa damai itu indah.

Pesan yang diterima oleh ahli dari Tulisan “Damai itu Indah”

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana makna pesan “Damai Itu Indah” dimaknai oleh empat kelompok perwakilan masyarakat. Pertama (1) penggiat media, kedua (2) masyarakat, ketiga (3) TNI, keempat (4) Akademisi.

1. Pesan “Damai itu indah” bagi pengiat media dan Aktivis

Damai itu indah sebagai program TNI, Menurut Risman A. Rachman (CEO Acehtrend/Media massa), tulisan “damai itu indah” sudah ada sebelum MoU Helsinki 2005. terutama pada masa darurat militer di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada kurun waktu 1990-1998. Bagi Risman pesan Damai itu Indah memiliki tiga makna. Pertama, sebagai propaganda yang dilakukan TNI untuk menginternalisasi nilai bahwa damai itu selalu diikuti dengan hal-hal yang baik,

tentram, dan nyaman. “pesan ini merupakan program TNI untuk menginternalisasi nilai (mempengaruhi pikiran), saat orang sering melihat pesan pada baliho, maka secara tidak langsung orang akan sepakat dengan Damai Itu Indah”. Kedua, aktivitas kehidupan hanya bisa dilakukan dengan baik dalam kondisi damai. “...kita juga bisa melihat jargon lain dari TNI, “Aceh Aman, Ibadah Nyaman”. Ini mempengaruhi masyarakat bahwa aktivitas sehari-hari hanya dapat terlaksana dengan baik hanya dalam kondisi damai.

Ketiga, pesan Damai Itu Indah dipengaruhi oleh nilai sosial masyarakat Aceh yang didominasi oleh nilai-nilai Islam, termasuk hal yang sangat esensial adalah persoalan ibadah. “pesan Aceh Aman, Ibadah Nyaman menunjukkan bahwa TNI sedang berusaha menggunakan kekhususan Aceh untuk melahirkan pemahaman damai itu melahirkan kondisi ideal bagi kehidupan di Aceh yang sarat dengan nilai-nilai keislaman”. Tiga makna tersebut menunjukkan bahwa Damai itu Indah hanya sebagai propaganda untuk meyakinkan masyarakat dan GAM bahwa damai itu adalah kondisi yang menentramkan (Rachman, 2018). Sehingga aktivitas kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan baik, dan kondisi damai memungkinkan masyarakat Aceh melakukan ibadah dengan nyaman. Pesan Damai itu Indah menurut Risman, menunjukkan posisi TNI sebagai agent perdamaian, dimana selain sebagai institusi yang berpihak perdamaian, mereka juga ini berusaha mempengaruhi masyarakat untuk berpihak pada perdamaian. Ketika pesan ini sudah terinternalisasi, masyarakat dapat menunjukkan keberpihakan pada perdamaian dan TNI dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik atau bekerja sama dengan GAM. “saya melihat ini upaya TNI untuk melahirkan persepsi di masyarakat bahwa TNI berpihak pada perdamaian, dan masyarakat serta GAM dapat ikut serta dalam menciptakan dan menjaga perdamaian, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik kembali” (Rachman, 2018).

Risman (CEO Acehtrend/Media massa) juga melihat Damai itu Indah bukan hanya sebagai pesan tapi juga diikuti program aksi yang dilakukan oleh TNI melalui beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. “Salah satu contoh program terkait pesan Damai itu Indah dimana TNI mendekati masyarakat dengan program TNI masuk desa, pesan “Bersama Rakyat TNI Kuat”, kegiatan swasembada pangan oleh TNI. Ini menunjukkan posisi TNI yang dekat dengan rakyat sama dengan TNI yang mendukung perdamaian”. Meski demikian pesan Damai itu Indah berdiri sendiri dan tidak terkait secara langsung dengan program yang dilakukan oleh TNI seperti yang disebutkan oleh, Risman.

Menurut Risman (CEO Acehtrend/Media massa) tidak ada keterkaitan antara pesan Damai itu Indah dengan posisi TNI dalam upaya pengungkapan kebenaran yang akan dilakukan oleh KKR Aceh.

“Pengungkapan kebenaran ditentukan oleh kinerja KKR termasuk bagaimana mereka bisa menyebarluaskan upaya pengungkapan kebenaran, menurut saya tidak ada kaitan antara pesan “Damai Itu Indah” dengan kerja pengungkapan kebenaran. itu dua hal yang terpisah, TNI hanya berusaha untuk menghadirkan damai bukan dalam usaha untuk menghambat pengungkapan kebenaran (keadilan)”

Damai itu indah. Sebagai jargon, Menurut, Faisal Hadi seorang aktivis HAM yang bekerjasama KontraS Aceh, Damai itu belum tentu indah terutama tanpa program pengungkapan kebenaran, karena penting untuk belajar dari masa lalu terutama terkait dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama konflik. “Damai itu indah belum cukup mampu menjadi alasan untuk mencegah potensi kekerasan dan konflik yang terulang karena kita belum mendefinisikan mana benar, mana yang salah, damai tanpa pengungkapan kebenaran ini yang menyebabkan kekerasan dan konflik terus terjadi.” itu sebabnya bagi Faisal Damai bisa menjadi sesuatu yang indah bagi sebagian orang namun tidak bagi sebagian yang lain, terutama mereka yang menjadi korban konflik atau keluarga korban (Hadi, 2018).

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh, Faisal Hadi (aktivis HAM). Faisal mengatakan sering melihat tulisan “Damai itu Indah”, terutama di pos-pos militer. Faisal Hadi mengatakan belum pernah melihat pesan tersebut di luar Aceh. Faisal juga mengatakan tulisan itu hanya jargon, ini disebabkan karena pesan itu disampaikan oleh tentara. “Karena yang menulis tentara dan mereka sering menulis jargon, maka menurut saya ini hanya jargon”. Selain itu Faisal menambahkan bahwa pesan ini tipikal pesan militer, seperti “NKRI Harga Mati”. Bagi Faisal ini hanya pesan damai, yang tidak diikuti dengan program atau aktivitas yang melibatkan masyarakat untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga perdamaian. “Jargon ini hanya memberikan pesan damai dan tidak ada program mengenai strategi untuk menyelesaikan perselisihan, memberi wawasan tentang perdamaian, bagaimana menjaga perdamaian dan menghindari potensi konflik”. Bagi Faisal pesan yang ingin disampaikan bahwa tentara mendukung perdamaian dan ingin melanggengkan perdamaian. “Pesan yang ingin disampaikan oleh TNI bahwa mereka adalah institusi yang setuju dengan perdamaian dan mereka juga ingin perdamaian ini terus terjaga (Hadi, 2018)

Meski tidak ada program secara khusus yang dilakukan TNI untuk mendukung perdamaian, namun menurut, Faisal ada beberapa hal yang dilakukan walaupun tidak langsung bisa berkontribusi upaya perbuatan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, sebagai contoh pihak TNI hadir pada acara diskusi tentang perdamaian, namun kebanyakan dari materi yang disampaikan sifatnya normatif. Pesan yang disampaikan terstruktur tentang apa yang dilakukan oleh TNI dan kondisi ideal yang diharapkan terhadap kondisi damai. “menurut saya pesan yang disampaikan oleh pemateri kurang bermakna dan mereka akan selalu pada sikap yang normatif tetapi kalau diundang pasti mereka hadir hadir.” Tentara belum melakukan tindakan untuk mendukung pasca konflik. Penjelasan diatas memberikan gambaran bagaimana pendapat para ahli terhadap pesan yang diterima dari jargon Damai itu Indah, ada dua pesan: Pertama, sebagai propaganda untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Kedua, Damai itu Indah sebagai jargon tanpa ada nilai dan aksi untuk mewujudkan perdamaian (Hadi, 2018).

2. Pesan “Damai Itu Indah” Bagi Masyarakat

Bagian ini akan mengulas bagaimana kata Damai itu Indah dimaknai oleh masyarakat sebagai kelompok kedua. Raisa, Alfira dan Shinta merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengatakan pernah melihat tulisan Damai Itu Indah di beberapa titik strategis di Kota Banda Aceh. Mereka menuturkan pesan tersebut tidak memiliki makna. “...cuma lihat aja, tidak berpikir apa-apa” (Alfira, 2018). Ketika menjawab pertanyaan apa yang mereka pikirkan saat mendengar kata “Damai itu Indah”, Raisa, mengatakan bahwa kata damai itu identik dengan tentram, nyaman, dan aman (Raisa, 2018). Ketiga remaja ini memaparkan bahwa mereka hanya mengetahui konflik Aceh cerita yang disampaikan oleh keluarga dan di sekolah. Mereka mengatakan menikmati hasil dari perdamaian dan sepakat bahwa Damai itu Indah (Shinta, 2018).

Sementara, Maulana seorang warga Banda Aceh lainnya mengatakan yang dia pikirkan ketika melihat pesan “Damai itu Indah” adalah konflik yang pernah terjadi di Aceh. Menurut, Mulana pesan ini bertujuan untuk meredam potensi konflik yang besar di Aceh termasuk agar konflik yang sama tidak terulang kembali. “Agar orang Aceh tidak terpikir untuk melakukan konflik, agar konflik tidak terulang lagi”. Sementara pesan yang diterima oleh Maulana, Damai itu Indah berarti selalu dalam damai, semua orang mendapatkan keuntungan melalui perdamaian (Maulana, 2018). Aulia mengatakan Damai itu Indah berarti tidak ada kekhawatiran. “Ya...kita lihat kondisi saat ini, orang bisa ngopi, bekerja dan tidak perlu merasa khawatir” (Aulia, 2018). Tapi menurut Maulana Damai belum tentu indah terutama bagi keluarga korban. Dia sampaikan masih ada keluarga korban yang belum bisa menikmati perdamaian secara penuh karena belum dapat menerima kehilangan anggota keluarga, termasuk trauma terhadap penyiksaan yang mereka alami (Maulana, 2018). Maulana dan Aulia menghubungkan kata Damai itu Indah dengan dua hal: nyaman dan aman.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bagaimana pesan Damai itu Indah diterima oleh masyarakat. Bahwa pesan ini merupakan upaya untuk meredam konflik dan potensi konflik di Aceh. Pesan Damai itu Indah identik dengan nyaman, aman, tentram, dan sejahtera.

3. TNI dan Pesan Damai Itu Indah

Pada bagian ini pesan damai itu indah diceritakan dari sudut pandang TNI sebagai kelompok ketiga dan akan membahas dua hal: Pertama, tentang pesan Damai itu Indah. Kedua, apa pesan yang ingin disampaikan oleh TNI melalui pesan Damai itu Indah. Ketiga, apa tujuan dari pesan ini. Keempat, apakah ada program aksi untuk sebagai tindak lanjut dari pesan tersebut.

Pesan “Damai itu Indah” bukan hal yang baru bagi TNI karena pesan ini sudah ada bahkan sejak TNI masih bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pesan ini merupakan tagline TNI dan hanya berada di pos-pos militer. Jika sebelumnya pesan ini dimaksudkan hanya untuk TNI dengan jumlah tulisan yang terbatas, maka saat ini pesan Damai itu Indah sudah menjadi sesuatu yang dimaksudkan untuk masyarakat. *“tulisan ini sudah ada sejak lama...dulu hanya tulisan di pos kodam dan koramil saja dengan tulisan tangan dan jumlah yang terbatas, karena belum ada percetakan seperti saat ini.”* Pesan Damai Itu Indah ada

di seluruh Indonesia, bisa ditemui di Kodam atau Kodim selain itu juga banyak ditemui di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah yang rawan konflik seperti Aceh, Papua dan Maluku.

“Tulisan ini sebenarnya ada di seluruh Indonesia...tetapi ada kecenderungan jumlah tulisan ini lebih banyak dan lebih besar di daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Papua, Maluku--dan daerah perbatasan dengan Malaysia. Tulisan ini jadi semakin booming saat Timor Leste berpisah dari Indonesia.”

Khusus untuk Aceh, pesan Damai itu Indah semakin banyak ditemukan setelah Tsunami. Menurut Cecep, seorang Petugas Media Center KODAM Iskandar Muda Aceh, ada instruksi untuk memperbanyak banner, baliho damai itu indah di tempat-tempat strategis. *“Ada instruksi dalam bentuk edaran yang dikeluarkan untuk memperbanyak pesan ini”* (wawancara). Masih menurut, Cecep pesan Damai itu Indah dipopulerkan oleh Jenderal TNI M. Yusuf saat menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 1978-1983. Kemudian diteruskan oleh jenderal-jenderal berikutnya.

Adapun tujuan dari pesan Damai itu Indah menurut, Rizky salah seorang petugas Media Center TNI KODAM Iskandar Muda Aceh, ini merupakan ajakan untuk memelihara perdamaian. *“...inikan ajakan, bukan perintah. kalau perintah ada sanksi kalau ajakan cuma anjuran saja. Semua orang suka damai...enak kayak gini kan? dari pada dulu saat konflik”*. Cecep menyebutkan, program yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pesan Damai itu Indah ini adalah Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Aksi Bela Negara, baik dalam kegiatan fisik maupun non fisik. Merujuk pada informasi yang disampaikan terkait program TMMD yang dilakukan oleh TNI, itu tidak masuk kedalam program yang dapat mendukung pesan Damai itu Indah secara langsung. Karena itu merupakan tugas TNI pada masa damai, sebenarnya itu tidak masuk dalam program yang dapat mendukung pesan Damai itu Indah, karena program TMMD lebih pada komitmen TNI untuk membantu tugas pemerintahan, khususnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pesan Damai itu Indah bukan hal yang baru, ini sudah ada sejak TNI masih dengan nama TKR. Pesan ini merupakan ajakan untuk menjaga perdamaian. Pesan ini dimaksudkan untuk TNI namun kemudian ia mulai ditujukan untuk masyarakat. Ada penambahan jumlah media pesan yang sebelumnya hanya di pos militer sekarang berada di tempat-tempat strategis dengan ukuran yang lebih besar. Terkait program yang dilakukan oleh TNI, sama seperti yang disampaikan oleh Faisal Hadi pada pembahasan sebelumnya, bahwa pesan ini hanya jargon yang tidak diikuti dengan aksi.

4. Damai itu Indah dalam pandangan Akademisi

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pendapat kelompok keempat yaitu akademisi terkait pesan “Damai itu Indah”. Akademisi yang diwawancawai berasal dari dua universitas di Banda Aceh yaitu dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas UIN Ar Raniry.

“...yang terlintas dalam pikiran saya ketika melihat Damai itu Indah, bahwa jargon tersebut merupakan bentuk dari arogansi TNI. Kata ini lebih terlihat seperti perintah daripada sebuah ajakan....yang cukup mengejutkan bagi saya bahwa slogan Damai itu Indah dapat ditemukan di banyak tempat strategis, menurut saya TNI sangat serius menyampaikan pesan itu...ini terlihat dari ukuran baliho yang mereka gunakan, bahkan ada satu baliho yang berukuran 5 kali lebih besar daripada standar baliho biasa, terletak di Blang Padang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi.”(Akademisi dari Universitas Syiah Kuala 2018).

Menurut akademisi ini, pesan ini memiliki kekuatan karena dikeluarkan oleh TNI untuk masyarakat terutama karena pilihan kata yang digunakan lebih seperti perintah. Kedua pesan oleh TNI disampaikan kepada masyarakat secara luas melalui pemilihan tempat yang strategis, ukuran baliho yang besar dan tersebar di beberapa titik di pusat kota. Merujuk pada penjelasan akademisi tersebut dimana tidak ada aksi atau kesepakatan bersama tentang Damai itu Indah maka hal ini memunculkan banyak interpretasi di tengah masyarakat. “ maka saya bingung, ada pesan yang begitu menjual tapi tidak ada program lebih lanjut, jadi bagi saya ini cuma perintah, “Sudah damai saja, damai itu Indah!”, bahkan ada teman saya yang mencurigai pesan ini sebagai upaya untuk mencegah upaya pengungkapan kebenaran” (Akademisi dari Universitas Syiah Kuala 2018).

Menurut seorang akademisi dari Universitas UIN Ar-Raniry, Banda Aceh mengatakan bahwa “Damai itu Indah” sebuah pesan yang memiliki tujuan tertentu, termasuk perdamaian yang berhasil terwujud di Aceh. Meski demikian, ini bukan pesan yang muncul begitu saja. Jargon Damai itu Indah adalah sebuah ide tentang kondisi ideal perdamaian, yang disampaikan oleh TNI sebagai pihak yang memproduksi pesan kepada masyarakat secara luas, terutama yang melihat pesan tersebut. “.....bagi saya pesan ini punya tujuan, yaitu menyebarluaskan ide/wacana tentang Damai itu Indah dan ini berhasil dilakukan dengan kemampuan pesan ini mempengaruhi semua pihak untuk mewujudkan perdamaian di Aceh” (Akademisi dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry 2018).

Merujuk pada penjelasan diatas, terlihat bahwa ada sebuah tujuan yang dibangun melalui pesan “Damai itu Indah”, dimana institusi TNI yang menyebarluaskan ide ini, dan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan pesan ini. Pada proses penyampaian pesan Damai itu Indah yang lebih terlihat adalah institusi yang menyampaikan pesan tersebut dan masyarakat yang menerima pesan, tetapi kemudian tidak diikuti dengan tindakan aksi. Hal ini terjadi karena pesan itu telah ada sejak lama dan untuk wilayah yang mengalami konflik, pesan ini diperbanyak dan diletakan di tempat strategis.

SIMPULAN

Dari empat kelompok, tulisan ini menemukan perbedaan pesan yang diterima dari baliho Damai Itu Indah. Pertama, bagi penggiat media Damai itu Indah merupakan program TNI dan bagi aktivis Damai Itu Indah merupakan Jargon. Kedua, bagi masyarakat Damai Itu Indah merupakan sesuatu yang apa adanya sesuai dengan pesan tersebut yaitu tentram, aman dan nyaman meski ada

pesan yang didapatkan bahwa Damai belum tentu Indah khususnya bagi korban konflik yang belum mendapatkan keadilan. Ketiga, bagi TNI Damai Itu Indah bukan hal yang baru, ini merupakan bagian dari TNI sejak lama hanya saja karena Aceh wilayah konflik maka pesan ini diperbanyak di ruang publik. Keempat, bagi Akademisi Damai Itu Indah itu adalah jargon. Selain itu pesan ini memiliki tujuan tertentu yaitu menyebarluaskan ide/wacana tentang damai itu indah.

Pesan “Damai Itu Indah” bukan bagian dari perdamaian abadi di Aceh. Pertama pesan “Damai Itu Indah” merupakan tagline TNI untuk institusi ini tapi kemudian pesan ini disebarluaskan untuk masyarakat terutama di wilayah konflik, rawan konflik dan perbatasan. Adapun tujuan pesan ini sebagai ajakan untuk memelihara perdamaian. Kedua, pesan yang diterima oleh masyarakat terbagi menjadi empat: Pertama, bahwa Damai itu Indah adalah aman, nyaman, tentram dan sejahtera. Kedua, Damai itu Indah adalah propaganda damai. Ketiga, Damai itu Indah adalah jargon tanpa nilai dan aksi. Keempat, Damai itu Indah bagi sebagian orang, namun tidak bagi korban konflik, bagi mereka damai itu belum tentu indah.

REFERENSI

- Abdul Fatah. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *CV. Harfa Creative* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Akbar, K. (2017). Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(2), 195–212. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art1>
- Ariefka, Y., Sari, K., & Yulandari, N. (2018). Memaafkan Pelaku Perkosaan Di Masa Konflik: Perjalanan Panjang Korban Konflik Di Aceh. *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah*, 1(2), 58–83. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v1i2.11572>
- Aspinall, E. (2009). *COMBATANTS TO CONTRACTORS: THE POLITICAL ECONOMY OF PEACE IN ACEH*. 87, 1–34.
- Bakri. (2016). gubernur lantik tujuh anggota KKR Aceh. *Aceh Tribun News*. <https://aceh.tribunnews.com/2016/10/25/gubernur-lantik-tujuh-anggota-kk-aceh>
- Feny Rita Fiantika, Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI* (Issue Maret).
- Flint, C. (2021). Introduction to Geopolitics. In *Introduction to Geopolitics* (Issue July 2021). <https://doi.org/10.4324/9781003138549>
- Gaillard, J. C., Clavé, E., & Kelman, I. (2008). Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia. *Geoforum*, 39(1), 511–526. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.10.010>
- Gilady, L. (2017). Triangle or “trilemma”: Rousseau and the “Kantian peace.” *Journal of International Relations and Development*, 20(1), 135–161. <https://doi.org/10.1057/jird.2015.3>
- Hamzah, M (2012), “Batas Kabupaten Ditancam di Depan Baliho Damai itu Indah”, 15 Oktober 2025, https://www.beritasatu.com/news/77464/batas-kabupaten-ditancam-di-depan-baliho-damai-itu-indah#goog_rewarded.
- He, B., & Reid, A. (2004). Special issue Editors’ introduction: four approaches to the Aceh question. *Asian Ethnicity*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.1080/1463136042000259752>
- Kant, Immanuel. (1989). *Perpetual Peace*, Translated by Lewis White Beck. New York: *Macmillan Publishing Company*.

- KKR Aceh. 2023. *Peurala Damee*, Laporan Temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) Aceh.
https://kkr.acehprov.go.id/media/2023.12/buku_laporan_peulara_damee1.pdf.
- Lee-koo, K. (2012). *gender at the crossroad of conflict: tsunami and peace in post-2005 Aceh*. 101, 59–77.
- Lubis, A. F. (2021). Tni Bersama Rakyat Mewujudkan Sikap Bela Negara Dalam Denyut Nadi Rakyat Indonesia. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(1), 41–49.
<https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.3239>
- Ocktaviana, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 383–398.
- Rachman, R. (2016). KKR Aceh untuk Mencari Kebenaran dan Rekonsiliasi. In *Banda Aceh*.
<https://www.acehtrend.com/news/kkr-aceh-untuk-mencari-kebenaran-dan-rekonsiliasi/index.html>
- Sulaiman, S. (2012). Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 56, 149–164.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6204%0Ahttps://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6204/5100>
- Syuib, M., & Hasnawati, D. (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 117.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13463>
- Went, A. (1992). Anarchy Is What States Make of It. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.4324/9781315664484-30>
- Zulfikar, E., Kher, A., Hakim, L. N., Hidayat, R., & Muhajirin, M. (2023). NKRI Harga Mati: Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Urgensi Persatuan di Tengah Kebinekaan. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 3(2), 141–156.
<https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.20214>